

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud dan Tujuan	2
I.3 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Cimahi	3
I.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi	9
I.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi	9
I.4.2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi	10
I.5 Isu – Isu Strategis	11
I.6 Landasan Hukum	13
I.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026	17
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	23
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
III.1 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023	29
III.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	31
III.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	32
III.3.1 Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	32
III.3.2 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	37
III.4 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Lalu	37
III.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra	38
III.6 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Level Provinsi	39
III.7 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Level Nasional	39
III.8 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung	39
III.9 Program Terkait	43
III.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara	6
Tabel I.2	Rekapitulasi Jumlah Tenaga Harian Lepas	7
Tabel I.3	Rekapitulasi Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan	7
Tabel II.1	Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023	17
Tabel II.2	Matriks Perencanaan Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023	20
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Cimahi 2023	23
Tabel II.4	Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023	26
Table II.5	Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023	26
Tabel III.1	Tabel Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023	29
Tabel III.2	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	31
Tabel III.3	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2023	32
Tabel III.4	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	32
Tabel III.5	Tabel Nama Ruas Jalan Kota	33
Tabel III.6	Perhitungan LOS Hari Ke – 1	34
Tabel III.7	Perhitungan LOS Hari Ke – 2	34
Tabel III.8	Perhitungan LOS Hari Ke – 3	35
Tabel III.9	Perhitungan LOS Hari Ke – 4	35
Tabel III.10	Tingkat Pelayanan Jalan/ Level of Service (LOS)	36
Tabel III.11	Perbandingan Capaian Tingkat Pelayanan Jalan	38
Tabel III.12	Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	38
Tabel III.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan dengan Target Akhir Renstra	38
Tabel III.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Target Akhir Renstra	39

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2023 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa yang akan datang.

Cimahi, 31 Januari 2024

✍️. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAH,** 



RUSWANTO, ATD., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691018 199403 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023. Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 (dua) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja, indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja dan direncanakan pada Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Terpadu dan Berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan (LOS)	C 0,72	C 0,75	95,83%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,10 Nilai	72,53 Nilai	144,77%

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023, diperoleh realisasi capaian kinerja sebesar 120,30%.

Anggaran murni Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 37.045.349.932,-, kemudian pada anggaran perubahan bertambah menjadi Rp. 50.737.663.527,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 13.692.313.595,- yang terdiri dari 2 (dua)

program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan.

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 45.371.230.419,- atau 89,42% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 50.737.663.527,-. Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Cimahi, 31 Januari 2024

 **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI,** 



RUSWANTO, ATD., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691018 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan (*development function*), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan *public good* seperti jalan dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain - lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan negara.

Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga Dinas Perhubungan Kota Cimahi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

I.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Cimahi.

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dalam laporan LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan.

I.3 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menangani di Bidang Perhubungan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016) didalamnya mengatur kewenangan Pemerintahan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan Latihan mengemudi;
 5. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 6. Penyediaan perlengkapan jalan untuk jalan daerah;
 7. Penyediaan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan daerah;
-

8. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe c;
 9. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
 10. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe c;
 11. Pembangunan terminal angkutan barang;
 12. Pengoperasian terminal;
 13. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanan dalam satu daerah;
 14. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan daerah;
 15. Pemberian izin trayek angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah daerah;
 16. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan daerah;
 17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi di daerah;
 18. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan Gerakan lalu lintas untuk jalan daerah;
 19. Penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu di daerah;
 20. Pemberian izin usaha angkutan barang;
 21. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah;
 22. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah;
 23. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan
-

daerah;

24. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan daerah;
25. Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
26. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan daerah;
27. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu daerah;
28. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah daerah;
29. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
30. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
31. Penentuan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor;
32. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
33. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - 1) Peraturan Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
 - 3) Perizinan Angkutan Umum
34. Penentuan lokasi fasilitas Parkir di Jalan Daerah;
35. Pengoperasian fasilitas Parkir untuk umum di Jalan Daerah;
36. Pengoperasian fasilitas Parkir di Jalan Daerah; dan/atau
37. Pembentukan dan penetapan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan penanganan masalah transportasi yang

merupakan salah satu program prioritas Wali Kota yaitu penanganan masalah kemacetan maka Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada anggaran tahun 2023 di dukung anggaran yang bersumber pada anggaran murni Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 37.045.349.932,-, kemudian pada anggaran perubahan bertambah menjadi Rp. 50.737.663.527,- atau mengalami penambahan sebesar Rp. 13.692.313.595,- yang terdiri dari 2 (dua) program, yaitu :

- 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang menjadi kewenangan daerah terutama di Bidang Perhubungan memiliki Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung tugas tersebut, antara lain :

- 1. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Karyawan / karyawan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 berjumlah 58 orang dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel I.1 Rekapitulasi Jumlah Aparatur Sipil Negara

No	Golongan / Pendidikan / Eselon	Jumlah
Menurut Golongan		
1	Golongan I	0 Orang
2	Golongan II	26 Orang
3	Golongan III	27 Orang
4	Golongan IV	6 Orang
Menurut Pendidikan		
1	Pasca Sarjana	15 Orang
2	Sarjana	5 Orang
3	Diploma	6 Orang
4	SLTA/ SMA/ SMK	33 Orang
5	SLTP/ SMP	0 Orang
6	SD	0 Orang

No	Golongan / Pendidikan / Eselon	Jumlah
Menurut Eselon		
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	3 Orang
3	Eselon IV	8 Orang

Karyawan / Karyawati Tenaga Kontrak (Non PNS) di Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 berjumlah 67 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel I.2 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Harian Lepas

No	Pendidikan	Jumlah
Menurut Pendidikan		
1	Pasca Sarjana	1 Orang
2	Sarjana	16 Orang
3	Diploma	3 Orang
4	SLTA/ SMA/ SMK	37 Orang
5	SLTP/ SMP	6 Orang
6	SD	4 Orang

2. Sarana Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Sarana kendaraan yang dikelola Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Rekapitulasi Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan

No	Merk/Type	Jenis	CC	Tahun Pembuatan	Tahun Pembelian	Nomor Polisi
Kendaraan Roda 4 (Empat)						
1	Toyota Rush 1.5G MT	Mini Bus	1495	2013	2013	D 1743 T
2	Suzuki Ertiga	Mini Bus	1373	2015	2015	D 1069 T
3	Mitsubishi/Double Cabin	Pick Up (Double Cabin) PJU	2477	2007	2007	D 8040 T
4	Mitsubishi Triton2.5 L DC HD (4x4) MT	Pick Up (Double Cabin)	2477	2015	2015	D 8479 T
5	Toyota Hilux Pick Up 2.4 DSL 4X4 M/T	Pick Up (Single Cabin)	2393	2023	2023	D 8071 T

No	Merk/Type	Jenis	CC	Tahun Pembuatan	Tahun Pembelian	Nomor Polisi
6	Suzuki Carry ST 100	Pick Up	970	2005	2005	D 8031 T
7	Nissan	Xtrail 2,0 A/T	1997	2015	2015	D 1087 T
8	Isuzu	Bis Sekolah	2771	2020	2020	D 7016 T
9	Toyota Hilux Pick Up 2.0 M.T	Pick Up (Single Cabin)	1998	2017	2017	D 8498 T
10	Nissan Navara	Pick Up (Double Cabin)	2488	2015	2015	D 8461 T
Kendaraan Roda 6 (Enam)						
1	Mitsubishi	Truck Derek	3908	2017	2017	D 9975 T
2	Hino	Truck Crean	4009	2014	2014	D 9928 T
3	Isuzu NKR66-2	Truck Crean	4332	2003	2003	D 8020 T
Kendaraan Roda 2 (Dua)						
1	Honda/CB500XAG	Sepeda Motor Sport	500	2016	2016	D 3711 T
2	Honda/CB500XAG	Sepeda Motor Sport	500	2016	2016	D 3712 T
3	Honda/CB500XAG	Sepeda Motor Sport	500	2016	2016	D 3713 T
4	Honda/CB500XAG	Sepeda Motor Sport	500	2016	2016	D 3714 T
5	Kawasaki Ninja EX250M	Sepeda Motor Sport Ninja 250	250	2015	2015	D 3634 T
6	Honda Vario 125	Sepeda Motor Matic	125	2016	2016	D 3677 T
7	Honda Vario 125	Sepeda Motor Matic	125	2016	2016	D 3678 T
8	Honda Vario 125	Sepeda Motor Matic	125	2016	2016	D 3679 T
9	Honda Vario NC12A1CF	Sepeda Motor Matic	125	2013	2013	D 3326 T
10	Honda NC12A1CBF	Sepeda Motor Matic	125	2013	2013	D 3244 T
11	Honda Vario NC 110 A1C	Sepeda Motor Matic	125	2014	2014	D 3473 T
12	Honda Vario NC110 A1C	Sepeda Motor Matic	125	2014	2014	D 3472 T
13	HondaNC12A1CBF	Sepeda Motor Matic	125	2013	2013	D 3132 T
14	Kawasaki KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2015	2015	D 3618 T
15	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2013	2013	D 3445 T
16	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2015	2015	D 3619 T
17	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2015	2015	D 3622 T
18	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2015	2015	D 3620 T
19	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2013	2013	D 3446 T
20	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2014	2014	D 3480 T
21	Kawasaki/KLX 150	Sepeda Motor Trail KLX	150	2014	2014	D 3479 T

I.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri atas :

1. Sekretariat
2. Bidang Lalu Lintas
3. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum
4. UPTD
5. Kelompok Jabatan Fungsional

I.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai bidang tugasnya

I.4.2 Rincian tugas pokok dan fungsi

Berikut rincian tugas pokok dan fungsi dari masing – masing unsur dari struktur organisasi :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan;

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- 1) Seksi Manajemen Keselamatan Jalan
- 2) Seksi Perparkiran
- 3) Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda

4. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum

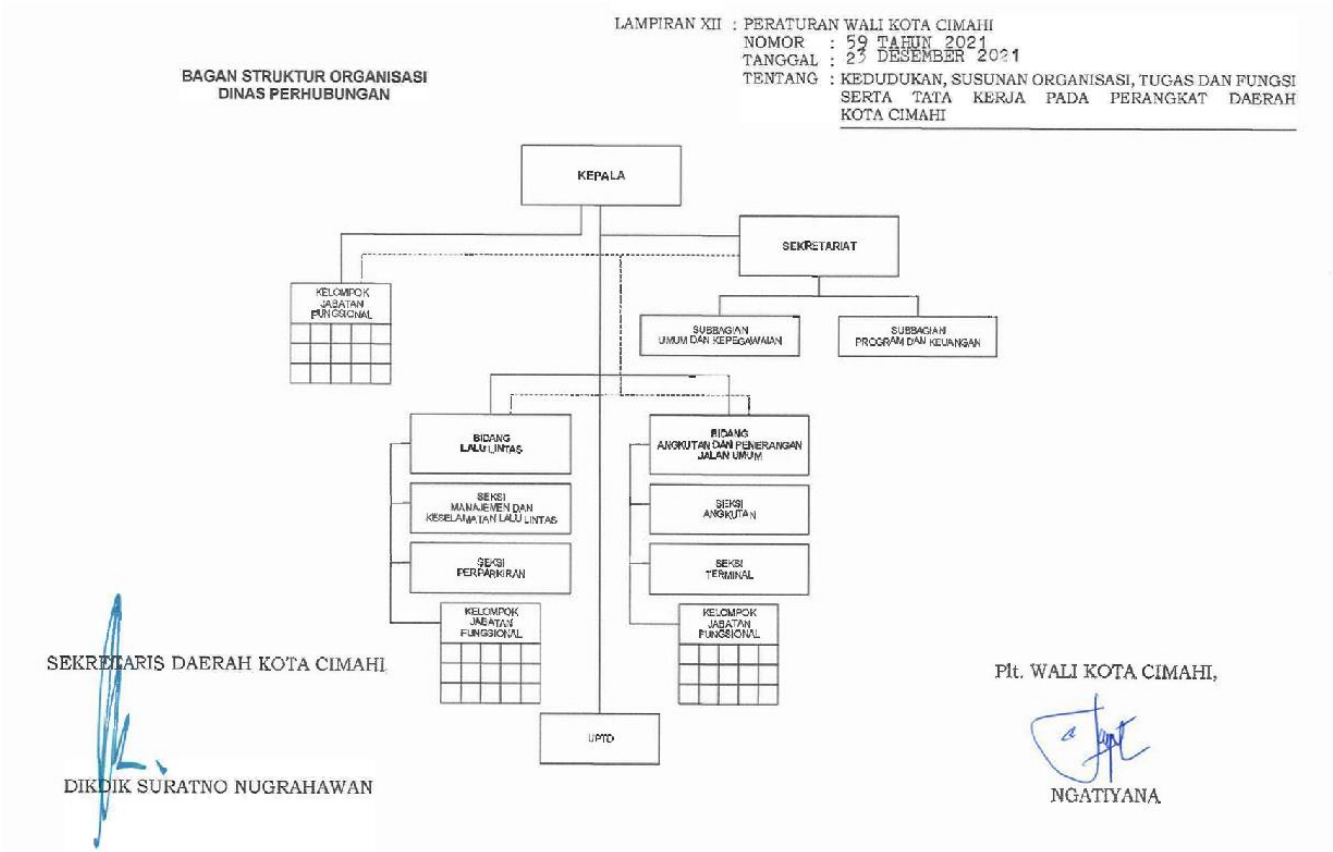
Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan. Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari :

- 1) Seksi Angkutan
- 2) Seksi Terminal
- 3) Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda

- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi :



I.5 Isu – Isu Strategis

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam perumusan prioritas pembangunan tetap menjaga keterkaitannya dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun permasalahan

pembangunan di Kota Cimahi yaitu belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (pelayanan jalan).

Berdasarkan RPD Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 tentang urusan perhubungan, permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi meliputi :

1. Belum optimalnya fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan berupa marka, rambu dan guardrail.
2. Kondisi kendaraan umum yang memenuhi laik jalan belum optimal dari seluruh kendaraan wajib uji.
3. Belum optimal sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dan sesuai standar prosedur seperti terminal tipe C, halte, lahan parkir yang memadai, dan sarana prasarana perhubungan lainnya.
4. Laju pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas jalan.
5. Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan Perhubungan.

Berdasarkan permasalahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, maka isu strategis yang ditentukan dalam upaya penyelesaian permasalahan urusan perhubungan meliputi :

1. Meningkatkan fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan, sehingga terwujudnya fasilitas perlengkapan dan prasarana jalan yang baik dan berkualitas serta memadai dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Cimahi.
 2. Optimalisasi peralatan alat uji dan meningkatkan SDM pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan
-

lalu lintas dengan optimalisasi alat uji dan peningkatan SDM Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai upaya meningkatkan pemenuhan persyaratan laik jalan angkutan umum.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan peningkatan jumlah, kualitas, dan pengembangan teknologi sarana prasarana perhubungan.
4. Revitalisasi dan analisis kebutuhan guna penambah jumlah halte yang selaras dengan penambahan jumlah rasio ijin trayek, meningkatkan kualitas halte yang digunakan dalam melakukan pelayanan penumpang dan menambah jumlah halte sesuai dengan analisis kebutuhan yang dilaksanakan.

I.6 Landasan Hukum

Peraturan – peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
-

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
-

2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325).

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan

hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan lampiran lain yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Cimahi mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II.1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023

Visi : CIMAHI KOTA CERDAS			
Misi : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan yang sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target
Meningkatkan pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas		Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	
	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	C
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	0,64
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	50%
		Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50%
		Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	83%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1.200 Unit
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	77 Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.203 Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal tipe C yang dikelola	100%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala 4400 Kendaraan
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 8 Unit
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 9167 Kendaraan
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4400 Dokumen
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 2 Laporan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 12 Unit
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ 3 Kegiatan
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota 7 Laporan
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 14 Dokumen
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin 18 Dokumen
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 6 Dokumen
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 12 Laporan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan 4 Kegiatan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 1 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 3 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 4 Laporan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia 8 kendaraan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia 8 kendaraan
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 29 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	1 Kegiatan	
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi		
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,10	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	
				IP ASN	50	
				Nilai IKM Perangkat Daerah	77,25	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	21 Dokumen	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129 Orang	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	12 Bulan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	41 Unit	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	56 Unit

Tabel II.2 Matriks Perencanaan Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023

Visi : CIMAHI KOTA CERDAS				
Misi : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan yang sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan				
Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target
Meningkatkan pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas			Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	
		Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	C
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	0,64
			Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	50%
			Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	50%
			Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	83%
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1.370 Unit
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	111 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4.828 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal tipe C yang dikelola	100%
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3 Unit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1 Kegiatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala 4400 Kendaraan
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 10 Unit
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 9167 Kendaraan
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4400 Dokumen
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 2 Laporan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 12 Unit
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ 3 Kegiatan
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Laporan
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 14 Dokumen
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin 18 Dokumen
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan 6 Dokumen
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 12 Laporan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan 4 Kegiatan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 2 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 3 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 3 Laporan
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 4 Laporan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia 8 kendaraan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia 8 kendaraan
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 29 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	1 Kegiatan	
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				Indeks Reformasi Birokrasi		
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,10	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	
				IP ASN	50	
				Nilai IKM Perangkat Daerah	77,25	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	22 Dokumen	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan PD	12 Bulan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129 Orang	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129 orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum PD	12 Bulan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	65 Unit	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	63 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	56 Unit

II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	$LOS = V/C$ LOS : Level of Service V : Volume lalu lintas (smp/jam) C : Kapasitas ruas jalan (smp/jam) (Nilai V/C Ratio menjadi nilai referensi untuk penentuan kategori LOS)	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan dari hasil evaluasi Inspektorat Kota Cimahi	Dinas Perhubungan

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2023-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perumusan Target Kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
-

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supevisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah :

1. Perubahan dalam strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
 2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
-

Tabel II.4 Perbandingan Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal	Target Revisi
1.	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	C 0,72	C 0,72
2.	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,10	50,10

II.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut :

Tabel II.5 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
Dinas Perhubungan		37.045.349.932	50.737.663.527	13.692.313.595	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		16.431.430.922	29.209.103.922	12.777.673.000	Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	12.520.298.722	25.309.421.722	12.789.123.000	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.794.575.622	19.903.625.622	10.109.050.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	639.844.000	720.680.000	80.836.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.213.263.200	3.812.500.200	2.599.237.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	872.615.900	872.615.900	-	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	624.326.300	603.676.300	- 20.650.000	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	554.979.300	534.329.300	- 20.650.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	69.347.000	69.347.000	-	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	290.866.800	290.866.800	-	
		290.866.800	290.866.800	-	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.364.905.500	1.365.111.500	206.000	Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	60.920.000	10.920.000	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	26.718.000	12.218.000	- 14.500.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	110.000.000	-	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.150.000	19.150.000	-	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000	5.000.000	-	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.127.637.500	1.125.741.500	- 1.896.000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.400.000	32.082.000	5.682.000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	880.485.800	880.485.800	-	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	368.168.600	368.168.600	-	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	488.317.200	488.317.200	-	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	24.000.000	24.000.000	-	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	73.700.000	73.700.000	-	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	22.500.000	22.500.000	-	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	51.200.000	51.200.000	-	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	108.210.700	124.854.700	16.644.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12.000.000	9.544.000	- 2.456.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	23.166.000	43.616.000	20.450.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	55.629.900	54.279.900	- 1.350.000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	17.414.800	17.414.800	-	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	543.832.400	536.182.400	- 7.650.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.576.400	130.576.400	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	413.256.000	405.606.000	- 7.650.000	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	24.804.700	24.804.700	-	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.804.700	24.804.700	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota		20.613.919.010	21.528.559.605	914.640.595	Mendukung Sasaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	279.537.450	152.032.450	- 127.505.000	Strategis Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.182.450	110.177.200	- 125.005.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.355.000	41.855.250	- 2.499.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.571.225.650	9.058.571.245	- 512.654.405	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.507.913.250	9.006.658.845	- 501.254.405	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.512.000	13.928.900	- 2.583.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.800.400	37.983.500	- 8.816.900	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	119.295.550	108.995.550	- 10.300.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.442.000	41.442.000	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77.853.550	67.553.550	- 10.300.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.299.550	616.803.550	14.504.000	Mendukung Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.650.000	10.650.000	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	60.000.000	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.555.000	65.976.000	- 29.579.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	226.150.550	241.423.550	15.273.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	28.944.000	28.944.000	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	6.000.000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	203.810.000	28.810.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	294.006.882	411.271.882	117.265.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.935.292	235.935.292	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.071.590	175.336.590	117.265.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	8.523.459.928	10.023.459.928	1.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.299.999.928	9.799.999.928	1.500.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.460.000	223.460.000	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.224.094.000	1.157.425.000	- 66.669.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	1.185.094.000	1.118.425.000	- 66.669.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	39.000.000	-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, telah dicapai realisasi anggaran sebesar 89,42% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1 Tabel Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Dinas Perhubungan	50.737.663.527	45.371.230.419	89,42%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.209.103.922	25.100.856.147	85,94%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	25.309.421.722	21.428.107.489	84,66%
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.903.625.622	16.547.850.254	83,14%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	720.680.000	667.621.412	92,64%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.812.500.200	3.425.752.868	89,86%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	872.615.900	786.882.955	90,18%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	603.676.300	576.991.960	95,58%
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	534.329.300	509.136.760	95,29%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	69.347.000	67.855.200	97,85%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	290.866.800	287.814.103	98,95%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.365.111.500	1.284.121.745	94,07%
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.920.000	58.552.270	96,11%
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12.218.000	11.976.500	98,02%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	110.000.000	100,00%
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.150.000	16.670.465	87,05%
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000	4.393.750	87,88%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.125.741.500	1.052.985.510	93,54%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32.082.000	29.543.250	92,09%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	880.485.800	819.085.802	93,03%
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	368.168.600	344.314.602	93,52%
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	488.317.200	450.948.100	92,35%
	24.000.000	23.823.100	99,26%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	73.700.000	58.777.700	79,75%
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	22.500.000	11.567.750	51,41%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	51.200.000	47.209.950	92,21%
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	124.854.700	121.676.700	97,45%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9.544.000	7.896.800	82,74%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	43.616.000	43.440.400	99,60%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	54.279.900	53.193.000	98,00%
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	17.414.800	17.146.500	98,46%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	536.182.400	499.844.048	93,22%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.576.400	127.987.200	98,02%
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	405.606.000	371.856.848	91,68%
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek	24.804.700	24.436.600	98,52%
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.804.700	24.436.600	98,52%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	21.528.559.605	20.270.374.272	94,16%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	152.032.450	138.968.600	91,41%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.177.200	100.762.050	91,45%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.855.250	38.206.550	91,28%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.058.571.245	8.686.639.602	95,89%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.006.658.845	8.640.327.952	95,93%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.928.900	11.639.900	83,57%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.983.500	34.671.750	91,28%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.995.550	70.168.000	64,38%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	41.442.000	13.025.000	31,43%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.553.550	57.143.000	84,59%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.803.550	558.527.868	90,55%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.650.000	9.477.000	88,99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	55.615.650	92,69%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.976.000	60.699.400	92,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	241.423.550	203.973.530	84,49%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	28.944.000	23.255.000	80,34%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	5.100.000	85,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.810.000	200.407.288	98,33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	411.271.882	354.914.000	86,30%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.935.292	186.420.000	79,01%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.336.590	168.494.000	96,10%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	10.023.459.928	9.721.750.039	96,99%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.799.999.928	9.504.738.640	96,99%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.460.000	217.011.399	97,11%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1.157.425.000	739.406.163	63,88%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	1.118.425.000	711.556.163	63,62%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000	27.850.000	71,41%

III.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 101,82% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Terpadu dan Berkualitas	Tingkat Pelayanan Jalan (LOS)	-	-	-	C 0,72	-	-	-	C 0,75	95,83%
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	-	-	50,10	-	-	-	72,53	144,77%

Tabel III.3 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2023

PROGRAM		TARGET				REALISASI				CAPAIAN
Program	Indikator Program	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
6	7	8				9				10
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	-	0,64	-	-	-	0,64	-	-	100%
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	12,5%	25%	37,5%	50%	12,5%	25%	37,5%	54,40%	108,80%
	Persentase Titik Kemacetan Ruas Jalan Arteri Sekunder yang tertangani	12,5%	25%	37,5%	50%	12,5%	25%	37,5%	66,67%	133,34%
	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	20,75%	41,5%	62,25%	83%	20,75%	41,5%	62,25%	72,43%	87,27%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	BB Nilai	-	-	-	BB Nilai	-	-	100%
	Nilai IKM Perangkat daerah	19,3 Nilai	38,65 Nilai	57,95 Nilai	77,25 Nilai	19,3 Nilai	38,65 Nilai	57,95 Nilai	80,53 Nilai	104,25%
	Indeks Profesionalitas ASN	12,54 Nilai	25,06 Nilai	37,58 Nilai	50,00 Nilai	12,54 Nilai	25,06 Nilai	37,58 Nilai	68,65 Nilai	137,30%
TOTAL										110,14%

III.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Stategis Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah Meningkatnya Pelayanan Transportasi yang Terpadu dan Berkualitas serta Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Tabel III.4 Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)	C 0,72	C 0,75	95,83%
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,10	72,53	144,77%

III.3.1 Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS)

Tingkat Pelayanan Jalan atau yang dikenal juga dengan Level of Service/ LOS, merupakan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan

dari tahun ke tahun. Kategori LOS dapat diperoleh dari nilai V/C Ratio maupun kecepatan, dimana V merupakan Volume Kendaraan (smp/jam) dan C merupakan Kapasitas Jalan (smp/jam). Volume kendaraan didapat dari hasil survei volume kendaraan atau yang dikenal juga dengan istilah *traffic counting*.

Perhitungan *traffic counting* ruas jalan secara rutin dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui rasio volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang ada. Pelaksanaan perhitungan *traffic counting* dianggarkan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 telah dilakukan traffic counting pada 23 ruas jalan kota Cimahi oleh PT Pelita Sarana Indotama. Survey dilakukan pada ruas jalan sebagai berikut :

Tabel III.5 Tabel Nama Ruas Jalan Kota

No	NAMA RUAS JALAN	Fungsi Jalan	Status Jalan	Tipe	Lebar Lajur Efektif (m)	Lebar Jalur (m)	Lebar Bahu (m)	Median (m)	Kelas Hambatan Samping
1	Jl. M.K Wiganda Sasmita	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2,75	5,5	0,2	0	Sedang
2	Jl Gedung Empat	ARTERI	KOTA	2/1 TT	4,5	9	0,3	0	Rendah
3	Jl Gandawijaya	ARTERI	KOTA	2/1 TT	4,55	9,1	0,3	0	Tinggi
4	Jl Dustira	ARTERI	KOTA	2/1 TT	3,5	7	0,4	0	Sedang
5	Jl Sriwijaya Arah Barat	ARTERI	KOTA	2/1 TT	3,5	7	0,2	0,8	Sedang
6	Jl Sriwijaya Arah Timur	ARTERI	KOTA	2/1 TT	3,5	7	0,2	0,8	Tinggi
7	Jl Pondok Dustira	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2,5	5	0	0	Rendah
8	Jl Warung Contong	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2,5	5	0,3	0	Sedang
9	Jl Sudirman	ARTERI	KOTA	2/1 TT	4	8	0,5	0	Sedang
10	Jl Stasion	ARTERI	KOTA	2/1 TT	3	6	0,7	0	Tinggi
11	Jl Usman Dhomiri	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2,6	5,2	0,7	0	Sedang
12	Jl Daeng M Ardiwinata	ARTERI	KOTA	2/2 TT	3	6	0,3	0	Sedang
13	Jl Margaluyu	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2	4	0	0	Sangat Tinggi
14	Jl Pesantren	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2,25	4,5	0,3	0	Sedang
15	Jl Jati Serut	ARTERI	KOTA	2/2 TT	4,25	8,5	0,3	0	Sedang
16	Jl Ciawitali	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2	4	0,3	0	Sedang
17	Jl Rd Demang Hardjakusumah	ARTERI	KOTA	2/2 TT	3,55	7,1	0,3	0	Sedang
18	Jl Sangkuriang	ARTERI	KOTA	2/2 TT	4	8	0,3	0	Sedang
19	Jl Encep Kartawiria	ARTERI	KOTA	2/2 TT	3	6	1	0	Sedang
20	Jl Mahar Martanegara	ARTERI	KOTA	2/2 TT	3,5	7	0,3	0	Tinggi
21	Jl Kebon Kopi	ARTERI	KOTA	2/2 TT	2,8	5,6	0,3	0	Sedang
22	Jl Kerkof	ARTERI	KOTA	2/2 TT	3,6	7,2	0,3	0	Sangat Tinggi
23	Jl HMS Mintaredja	ARTERI	KOTA	4/2 TT	6	12	0,3	0	Rendah
24	Jl RD Embang Artawidjaja	KOLEKTOR	KOTA	2/1 TT	2	4	0	0	Rendah

Survei dilakukan selama 4 (empat) hari pada hari Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa mulai dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00. Dari perhitungan hasil traffic counting 23 ruas jalan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.6 Perhitungan LOS Hari Ke - 1

No	RUAS JALAN	TIPE JALAN	C	VJP	V/ C Ratio	Kecepatan	Kepadatan	LOS
HARI KE - 1								
1	Jl. M.K Wiganda Sasmita	2/ 2 TT	1312	764	0.58	25.9	29.5	C
2	Jl Gedung Empat	2/ 1 TT	1622	1021	0.63	32.1	31.8	C
3	Jl Gandawijaya	2/ 1 TT	1519	1419	0.93	24.2	58.6	E
4	Jl Dustira	2/ 1 TT	1470	1139	0.77	29.3	38.9	D
5	Jl Sriwijaya 1	2/ 1 TT	1470	836	0.57	20.1	41.6	C
6	Jl Sriwijaya 2	2/ 1 TT	1406	861	0.61	19.5	44.2	C
7	Jl Pondok Dustira	2/ 2 TT	1356	563	0.41	39.5	14.2	B
8	Jl Warung Contong	2/ 2 TT	1312	777	0.59	35.4	22.0	C
9	Jl Sudirman	2/ 1 TT	1588	1050	0.66	35.3	29.7	C
10	Jl Stasion	2/ 1 TT	1294	963	0.74	39.2	24.6	C
11	Jl Usman Dhomiri	2/ 2 TT	1356	641	0.47	34.2	18.7	C
12	Jl Daeng M Ardiwinata	2/ 2 TT	1312	1266	0.97	29.2	43.4	E
13	Jl Margaluyu	2/ 2 TT	1076	705	0.65	20.1	35.1	C
14	Jl Pesantren	2/ 2 TT	1312	764	0.58	23.4	32.6	C
15	Jl Jati Serut	2/ 2 TT	1312	1047	0.80	22.1	47.4	D
16	Jl Ciawitali	2/ 2 TT	1312	899	0.69	25.9	34.7	C
17	Jl Rd Demang Hardjakusumah	2/ 2 TT	1312	955	0.73	29.2	32.7	C
18	Jl Sangkuriang	2/ 2 TT	1312	1142	0.87	27.8	41.1	E
19	Jl Encep Kartawiria	2/ 2 TT	1356	951	0.70	39.4	24.1	C
20	Jl Mahar Martanegara	2/ 2 TT	1209	1186	0.98	29.3	40.5	E
21	Jl Kebon Kopi	2/ 2 TT	1312	1072	0.82	25.3	42.4	D
22	Jl Kerkof	2/ 2 TT	1076	1066	0.99	24.9	42.8	E
23	Jl HMS Mintaredja	4/ 2 TT	2672	1260	0.47	42.2	29.8	C
24	Jl RD Embang Artawidjaja	2/ 1 TT	1382	410	0.30	39.5	10.4	B

Tabel III.7 Perhitungan LOS Hari Ke - 2

No	RUAS JALAN	TIPE JALAN	C	VJP	V/ C Ratio	Kecepatan	Kepadatan	LOS
HARI KE - 2								
1	Jl. M.K Wiganda Sasmita	2/ 2 TT	1312	854	0.65	25.9	33.0	C
2	Jl Gedung Empat	2/ 1 TT	1622	1049	0.65	32.1	32.7	C
3	Jl Gandawijaya	2/ 1 TT	1519	1338	0.88	24.2	55.3	E
4	Jl Dustira	2/ 1 TT	1470	1130	0.77	29.3	38.6	D
5	Jl Sriwijaya 1	2/ 1 TT	1470	948	0.64	20.1	47.2	C
6	Jl Sriwijaya 2	2/ 1 TT	1406	972	0.69	19.5	49.8	C
7	Jl Pondok Dustira	2/ 2 TT	1356	593	0.44	39.5	15.0	B
8	Jl Warung Contong	2/ 2 TT	1312	907	0.69	35.4	25.6	C
9	Jl Sudirman	2/ 1 TT	1588	1067	0.67	35.3	30.2	C
10	Jl Stasion	2/ 1 TT	1294	958	0.74	39.2	24.4	C
11	Jl Usman Dhomiri	2/ 2 TT	1356	715	0.53	34.2	20.9	C
12	Jl Daeng M Ardiwinata	2/ 2 TT	1312	1338	1.02	29.2	45.8	E
13	Jl Margaluyu	2/ 2 TT	1076	680	0.63	20.1	33.8	C
14	Jl Pesantren	2/ 2 TT	1312	756	0.58	23.4	32.3	C
15	Jl Jati Serut	2/ 2 TT	1312	1054	0.80	22.1	47.7	D
16	Jl Ciawitali	2/ 2 TT	1312	869	0.66	25.9	33.6	C
17	Jl Rd Demang Hardjakusumah	2/ 2 TT	1312	1072	0.82	29.2	36.7	D
18	Jl Sangkuriang	2/ 2 TT	1312	1133	0.86	27.8	40.8	E
19	Jl Encep Kartawiria	2/ 2 TT	1356	966	0.71	39.4	24.5	C
20	Jl Mahar Martanegara	2/ 2 TT	1209	1194	0.99	29.3	40.8	E
21	Jl Kebon Kopi	2/ 2 TT	1312	991	0.76	25.3	39.2	D
22	Jl Kerkof	2/ 2 TT	1076	1052	0.98	24.9	42.2	E
23	Jl HMS Mintaredja	4/ 2 TT	2672	1398	0.52	42.2	33.1	C
24	Jl RD Embang Artawidjaja	2/ 1 TT	1382	591	0.43	39.5	15.0	B

Tabel III.8 Perhitungan LOS Hari Ke - 3

No	RUAS JALAN	TIPE JALAN	C	VJP	V/ C Ratio	Kecepatan	Kepadatan	LOS
HARI KE - 3								
1	Jl. M.K Wiganda Sasmita	2/ 2 TT	1312	894	0.68	25.9	34.5	C
2	Jl Gedung Empat	2/ 1 TT	1622	1232	0.76	32.1	38.4	D
3	Jl Gandawijaya	2/ 1 TT	1519	1327	0.87	24.2	54.8	E
4	Jl Dustira	2/ 1 TT	1470	1237	0.84	29.3	42.2	D
5	Jl Sriwijaya 1	2/ 1 TT	1470	1127	0.77	20.1	56.1	D
6	Jl Sriwijaya 2	2/ 1 TT	1406	1146	0.81	19.5	58.8	D
7	Jl Pondok Dustira	2/ 2 TT	1356	785	0.58	39.5	19.9	C
8	Jl Warung Contong	2/ 2 TT	1312	1125	0.86	35.4	31.8	E
9	Jl Sudirman	2/ 1 TT	1588	1228	0.77	35.3	34.8	D
10	Jl Stasiun	2/ 1 TT	1294	1060	0.82	39.2	27.0	D
11	Jl Usman Dhomiri	2/ 2 TT	1356	846	0.62	34.2	24.7	C
12	Jl Daeng M Ardiwinata	2/ 2 TT	1312	1248	0.95	29.2	42.7	E
13	Jl Margaluyu	2/ 2 TT	1076	868	0.81	20.1	43.2	D
14	Jl Pesantren	2/ 2 TT	1312	954	0.73	23.4	40.8	C
15	Jl Jati Serut	2/ 2 TT	1312	1120	0.85	22.1	50.7	E
16	Jl Ciawitali	2/ 2 TT	1312	1063	0.81	25.9	41.1	D
17	Jl Rd Demang Hardjakusumah	2/ 2 TT	1312	1140	0.87	29.2	39.0	E
18	Jl Sangkuriang	2/ 2 TT	1312	1148	0.88	27.8	41.3	E
19	Jl Encep Kartawiria	2/ 2 TT	1356	1125	0.83	39.4	28.6	D
20	Jl Mahar Martanegara	2/ 2 TT	1209	1212	1.00	29.3	41.4	E
21	Jl Kebon Kopi	2/ 2 TT	1312	1224	0.93	25.3	48.4	E
22	Jl Kerkof	2/ 2 TT	1076	1065	0.99	24.9	42.8	E
23	Jl HMS Mintaredja	4/ 2 TT	2672	1484	0.56	42.2	35.2	C
24	Jl RD Embang Artawidjaja	2/ 1 TT	1382	902	0.65	39.5	22.8	C

Tabel III.9 Perhitungan LOS Hari Ke - 4

No	RUAS JALAN	TIPE JALAN	C	VJP	V/ C Ratio	Kecepatan	Kepadatan	LOS
HARI KE - 4								
1	Jl. M.K Wiganda Sasmita	2/ 2 TT	1312	833	0.64	25.9	32.2	C
2	Jl Gedung Empat	2/ 1 TT	1622	1276	0.79	32.1	39.7	D
3	Jl Gandawijaya	2/ 1 TT	1519	1339	0.88	24.2	55.3	E
4	Jl Dustira	2/ 1 TT	1470	1199	0.82	29.3	40.9	D
5	Jl Sriwijaya 1	2/ 1 TT	1470	1145	0.78	20.1	57.0	D
6	Jl Sriwijaya 2	2/ 1 TT	1406	1108	0.79	19.5	56.8	D
7	Jl Pondok Dustira	2/ 2 TT	1356	851	0.63	39.5	21.6	C
8	Jl Warung Contong	2/ 2 TT	1312	1146	0.87	35.4	32.4	E
9	Jl Sudirman	2/ 1 TT	1588	1242	0.78	35.3	35.2	D
10	Jl Stasiun	2/ 1 TT	1294	1050	0.81	39.2	26.8	D
11	Jl Usman Dhomiri	2/ 2 TT	1356	936	0.69	34.2	27.4	C
12	Jl Daeng M Ardiwinata	2/ 2 TT	1312	1272	0.97	29.2	43.6	E
13	Jl Margaluyu	2/ 2 TT	1076	851	0.79	20.1	42.3	D
14	Jl Pesantren	2/ 2 TT	1312	919	0.70	23.4	39.3	D
15	Jl Jati Serut	2/ 2 TT	1312	1097	0.84	22.1	49.6	D
16	Jl Ciawitali	2/ 2 TT	1312	1116	0.85	25.9	43.1	E
17	Jl Rd Demang Hardjakusumah	2/ 2 TT	1312	1167	0.89	29.2	40.0	E
18	Jl Sangkuriang	2/ 2 TT	1312	1106	0.84	27.8	39.8	D
19	Jl Encep Kartawiria	2/ 2 TT	1356	1136	0.84	39.4	28.8	D
20	Jl Mahar Martanegara	2/ 2 TT	1209	1200	0.99	29.3	41.0	E
21	Jl Kebon Kopi	2/ 2 TT	1312	1195	0.91	25.3	47.2	E
22	Jl Kerkof	2/ 2 TT	1076	1075	1.00	24.9	43.2	E
23	Jl HMS Mintaredja	4/ 2 TT	2672	1551	0.58	42.2	36.7	C
24	Jl RD Embang Artawidjaja	2/ 1 TT	1382	902	0.65	39.5	22.8	C

Dari hasil perhitungan traffic counting 23 ruas jalan di atas, maka dapat
dihitung rata-rata V/C rasio sebagai berikut :

Rata-rata V/C rasio 23 Hari ke-1 = $\frac{(\text{Jumlah V/C R 23 Ruas})}{24} = \frac{16,51}{24} = 0,68$
(Berdasarkan hasil survey 14jam/hari
Pada weekend dan weekday)

Rata-rata V/C rasio 23 Hari ke-2 = $\frac{(\text{Jumlah V/C R 23 Ruas})}{24} = \frac{17,11}{24} = 0,71$
(Berdasarkan hasil survey 14jam/hari
Pada weekend dan weekday)

Rata-rata V/C rasio 23 Hari ke-3 = $\frac{(\text{Jumlah V/C R 23 Ruas})}{24} = \frac{19,24}{24} = 0,80$
(Berdasarkan hasil survey 14jam/hari
Pada weekend dan weekday)

Rata-rata V/C rasio 23 Hari ke-4 = $\frac{(\text{Jumlah V/C R 23 Ruas})}{24} = \frac{19,33}{24} = 0,81$
(Berdasarkan hasil survey 14jam/hari
Pada weekend dan weekday)

V/C rasio 23 ruas jalan = $\frac{(\text{V/C Rasio 4 hari})}{4} = \frac{(0,68+0,71+0,80+0,81)}{4} = 0,75$

Berikut ini Tingkat Pelayanan Jalan ditentukan berdasarkan parameter atau batasan - batasan karakteristik dan nilai v/c rasio :

Tabel III.10 Tingkat Pelayanan Jalan/ Level of Service (LOS)

Tingkat Pelayanan	Karakteristik-karakteristik	Batas Lingkup (V/C)
A	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki	< 0.60
B	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas. Pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya	0,60 <V/C<0,70
C	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas	0,70 <V/C<0,80
D	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda – beda, volume mendekati kapasitas	0,80 <V/C<0,90
E	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda – beda, volume mendekati kapasitas	0,90 <V/C<1,00
F	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama	>1.00

Berdasarkan rata-rata hasil *traffic counting* 23 Ruas Jalan Kota Cimahi untuk total 2 (dua) arah didapatkan V/C Rasio = 0,75 sehingga didapat Tingkat Pelayanan Jalan/ Level of Service (LOS) C (Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas). Berikut metode pengukuran

untuk capaian yang semakin rendah realisasinya semakin tinggi capaian kinerjanya :

$$\% \text{ Pencapaian Target Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target LOS Kota Cimahi Tahun 2023 adalah C dengan nilai V/C Ratio 0,72 dan realisasi LOS Kota Cimahi adalah C dengan nilai V/C Ratio sebesar 0,75 sehingga diperoleh capaian sebesar 95,83% (target belum tercapai).

III.3.2 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan

Perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran Reformasi Birokrasi. Area-area perubahan tersebut meliputi : mental, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Pengukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh inspektorat Kota Cimahi didapatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan pada Tahun 2023 sebesar 72,53. Dengan target nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebesar 50,10 dan realisasi sebesar 72,53 maka diperoleh capaian sebesar 144,77% (target tercapai).

III.4 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Berikut adalah tabel perhitungan perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022 :

Tabel III.11 Perbandingan Capaian Tingkat Pelayanan Jalan

	2022	2023	2024	2025	2026
Target	C 0,72	C 0,72	C 0,72	C 0,72	C 0,72
Realisasi	C 0,46	C 0,75	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	136,13%	95,83%	-	-	-
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari Tahun Lalu		-0,29	Menurun		
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari Tahun Lalu		-40,28%	Menurun		

Tabel III.12 Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

	2022	2023	2024	2025	2026
Target	-	50,10 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai
Realisasi	-	72,53 Nilai	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	-	144,77%	-	-	-
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari Tahun Lalu	Angka tidak dapat dihitung karena Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi belum menjadi indikator capaian kinerja pada tahun 2022				
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari Tahun Lalu	Angka tidak dapat dihitung karena Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi belum menjadi indikator capaian kinerja pada tahun 2022				

III.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Berikut adalah tabel perhitungan perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian target akhir Renstra :

Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan dengan Target Akhir Renstra

	2022	2023	2024	2025	2026
Target	C 0,72	C 0,72	C 0,72	C 0,72	C 0,72
Realisasi	C 0,46	C 0,75	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	136,13%	95,83%	-	-	-
Capaian Realisasi dari Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra	-	95,83%	Capaian dalam batas aman (25% dari target akhir Renstra)		

Tabel III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Target Akhir Renstra

	2022	2023	2024	2025	2026
Target	-	50,10 Nilai	50,50 Nilai	51 Nilai	51,50 Nilai
Realisasi	-	72,53 Nilai	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	-	144,77%	-	-	-
Capaian Realisasi dari Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra		140,83%	Capaian melebihi batas aman (25% dari target akhir Renstra)		

III.6 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Level Kota/ Kabupaten

Hanya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada pada indikator kinerja level Kota Yogyakarta Tahun 2023. Berikut perbandingannya :

	2023	Kota Yogyakarta 2023	Perbandingan dengan Kota Yogyakarta
Target	50,10 Nilai	69,41 Nilai	-19,31
Realisasi	51,92 Nilai	80,36 Nilai	-7,83
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	144,77%	Kota Cimahi masih berada 7,83 poin di bawah Kota Yogyakarta	

III.7 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Level Nasional

Hanya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada pada indikator kinerja level nasional Tahun 2023. Berikut perbandingannya :

	2023	Sekretariat Kementerian PPPA	Perbandingan Sekretariat Kementerian PPPA
Target	50,10 Nilai	77	-26,90
Realisasi	72,53 Nilai	73,57	-1,04
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan	144,77%	Kota Cimahi masih berada 1,04 poin di bawah Sekretariat Kementerian PPPA	

III.8 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Akar permasalahan tingkat pelayanan jalan/ Level of Service belum mencapai target pada tahun 2023 (faktor penghambat) diantaranya :

1. Survei hanya dilakukan di 23 ruas jalan kota dari 108 ruas jalan kota yang ada di Cimahi (hanya sebesar 21,3%). 23 ruas jalan kota yang diambil merupakan jalan kota yang memang memiliki track record jalan kota dengan kondisi lalu lintas padat. Sehingga angka V/C Rasio 0,75 masih dapat bergeser lebih baik jika survey dilakukan lebih dari 23 ruas jalan kota.
 2. Aktivitas Masyarakat sudah kembali normal pasca pandemi covid 19, sehingga volume lalu lintas tahun 2023 lebih tinggi dari volume lalu lintas tahun sebelumnya.
 3. Terjadinya bangkitan lalu lintas yang masif dan sporadis sebagai dampak dari tata guna lahan yang tidak terkonsep dengan baik.
 4. Masyarakat masih enggan untuk menggunakan transportasi umum dikarenakan beberapa alasan, diantaranya waktu tempuh dengan menggunakan transportasi pribadi lebih singkat daripada menggunakan transportasi umum, fasilitas halte dan pejalan kaki yang masih belum layak, feeder (angkutan perkotaan) ke transportasi masal (bus/ kereta api) masih belum nyaman.
 5. Jaringan jalan di kota Cimahi belum sepenuhnya terhubung dengan transportasi umum (rasio konektivitas masih kurang).
 6. Hambatan samping yang masih tinggi, disebabkan antara lain oleh adanya pasar tumpah di beberapa ruas jalan kota, masih banyak tempat usaha yang tidak memberikan fasilitas parkir yang memadai, sehingga penggunaan badan jalan untuk parkir tidak bisa dihindari.
-

7. Kemudahan Masyarakat dalam kepemilikan kendaraan pribadi sangat dipermudah, misal uang muka 0%, cicilan dengan bunga rendah, potongan harga untuk motor atau mobil Listrik.
8. Keterbatasan petugas lalu lintas dishub (traffic warden) di lapangan untuk pengaturan lalu lintas.
9. Perilaku berkendara masyarakat yang tidak disiplin/ taat aturan sehingga kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas.
10. Geometrik dan tingkat kemantapan jalan masih perlu untuk lebih ditingkatkan guna memperlancar arus kendaraan/ lalu lintas,
11. Banyaknya friksi di Masyarakat ketika akan dilakukan rekayasa lalu lintas di lokasi yang rawan kemacetan.

Faktor Pendukung dalam upaya mencapai tingkat pelayanan jalan yang lebih baik, diantaranya :

1. Dilakukan survei di seluruh 108 ruas jalan kota untuk mendapatkan hasil tingkat pelayanan jalan yang sesungguhnya.
 2. Perbaikan grand desain tata guna lahan dan pengawasan pemanfaatan tata guna lahan.
 3. Meningkatkan rasio konektivitas kota dan perbaikan sistem transportasi umum beserta sarana prasarannya.
 4. Pemberian insentif/ subsidi bagi pengguna transportasi umum sehingga Masyarakat lebih tertarik menggunakan kendaraan umum.
 5. Melakukan kajian parkir on street dan off street dan menertibkan perparkiran bangunan usaha, pasar dan pusat keramaian.
 6. Peningkatan geometrik dan tingkat kemantapan jalan untuk memperlancar arus kendaraan.
-

7. Sosialisasi dan penegakan hukum guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara.
8. Peningkatan kapasitas petugas traffic warden dan fasilitas penunjang lainnya.
9. Pelibatan masyarakat dalam FGD maupun forum lalu lintas.
10. Memiliki inovasi berbasis elektronik yang sesuai core bisnis Dinas Perhubungan dan telah terdaftar di Diskominfo.

Faktor Penghambat dalam upaya mencapai nilai Reformasi Birokrasi yang lebih baik, diantaranya :

1. Keterbatasan jumlah pegawai yang kompeten sesuai bidang pekerjaannya.
2. Masih terdapat mindset yang berbeda dalam pengelolaan program dan kegiatan.
3. Sistem/ aplikasi baru yang bertambah banyak dan semakin kompleks dalam pemanfaatannya.
4. Keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan kearsipan digital, pengelolaan pengaduan, evaluasi SAKIP, SPIP, ZI dan lain sebagainya.
5. Komitmen seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas secara berAKHLAK masih dinilai belum maksimal.

Faktor Pendukung dalam upaya mencapai nilai Reformasi Birokrasi yang lebih baik, diantaranya :

1. Tersedianya pegawai yang kompeten sesuai bidang pekerjaannya dengan jumlah yang mencukupi.
 2. Melengkapi data prioritas, data statistik sektoral dan memperbaiki
-

pengawasan kearsipan internal.

3. Membentuk tim pengelola SP4N-LAPOR dan melakukan pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan.
4. Melakukan monitoring rencana aksi untuk RB dan Sakip secara berjenjang dan berkala.
5. Melakukan perbaikan dalam reformasi hukum yang meliputi pengusulan pembentukan perda/perkada dan evaluasi produk hukum dan tindaklanjutnya yang berkaitan dengan tugas Dinas Perhubungan.
6. Melakukan sinergitas program kegiatan pusat dan daerah dalam perencanaan.

III.9 Program Terkait

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Cimahi diperlukan program-program terkait, di antaranya :

1. Peningkatan rasio konektivitas kota dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas.
 2. Peningkatan rasio kendaraan bermotor yang layak jalan dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas.
 3. Penanganan titik kemacetan ruas jalan dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas.
 4. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dalam
-

upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas.

5. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Perhubungan dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.
6. Peningkatan indeks profesionalitas ASN dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.
7. Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perhubungan dalam upaya mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

III.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) capaian sasaran strategis secara menyeluruh sebesar 10,58% atau sebesar Rp. 5.366.433.108,-. Efisiensi sumber daya atas capaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan transportasi darat yang terpadu dan berkualitas ini tidak ada dikarenakan indikator kinerja utama tidak mencapai 100%. Sedangkan efisiensi sumber daya (anggaran) atas capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik sebesar 5,84% atau sebesar Rp. 1.258.185.333,-.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP yang di susun Dinas Perhubungan Kota Cimahi merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik pada Tahun Anggaran 2023. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan serta efektivitaas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2023 dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

1. Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services / LOS) sebesar 95,83%.
2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan sebesar 144,77%.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini diharapkan dapat memberi informasi secara transparan sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja akuntabel bagi Dinas Perhubungan pada periode mendatang.

Berikut ini beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan sebagai Upaya perbaikan di masa depan :

1. Dilakukan survei di seluruh 108 ruas jalan kota untuk mendapatkan hasil tingkat pelayanan jalan yang sesungguhnya.
 2. Meningkatkan rasio konektivitas kota dan perbaikan sistem transportasi umum beserta sarana prasarananya.
-

3. Melakukan kajian parkir on street dan off street dan menertibkan perparkiran bangunan usaha, pasar dan pusat keramaian.
 4. Sosialisasi dan penegakan hukum guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara.
 5. Tersedianya pegawai yang kompeten sesuai bidang pekerjaannya dengan jumlah yang mencukupi.
 6. Memiliki inovasi berbasis elektronik yang sesuai core bisnis Dinas Perhubungan dan telah terdaftar di Diskominfo.
 7. Melengkapi data prioritas, data statistik sektoral dan memperbaiki pengawasan kearsipan internal.
 8. Membentuk tim pengelola SP4N-LAPOR dan melakukan pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan.
 9. Melakukan monitoring rencana aksi untuk RB dan Sakip secara berjenjang dan berkala.
 10. Melakukan perbaikan dalam reformasi hukum yang meliputi pengusulan pembentukan perda/perkada dan evaluasi produk hukum dan tindaklanjutnya yang berkaitan dengan tugas Dinas Perhubungan.
 11. Melakukan sinergitas program kegiatan pusat dan daerah dalam perencanaan.
-